

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN DIDESA PULAU PALAS  
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensivestrata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

**RAHMAT ADI GUNAWAN**  
**NIM : 10975007002**



**PROGRAM S.I**  
**JURUSA ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2013 M/1434 H**

## **ABSTRAK**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh :**

**Rahmat Adi Gunawan**  
**NIM.10975007002**

*Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner. Kemudian jenis dan teknik analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu tergolong rendah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu faktor sosial dan ekonomi, faktor politik, faktor fisik individu dan lingkungan dan faktor nilai dan budaya. Faktor-faktor tersebut dinyatakan cukup berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini, faktor yang paling dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yaitu faktor politik.*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KAUPATEN INDRAGIRI HILIR”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. ALLAH SWT karena dengan ridho Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Robani dan Ibunda tercinta Srikat, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

3. Bapak Prof.DR.H.M.Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau
4. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal, S,sos.M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
7. Buat Kakak, Abang dan Adikku tersayang Aku Sayang kalian semua terima kasih sudah mensuport dan buat Adikku tersayang.
8. Buat seseorang yang spesial yang tak bosan-bosannya menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis, ku persembahkan kepada Dwi Jayati, A.Md.Keb
9. Ibu Devi Deswimar S.Sos, M.SI yang selalu memberikan bantuan pikiran dan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih Buat teman – teman seperjuangan, terutama lokal C angkatan 2009 Jurusan Adm. Negara dan Semua Teman - teman yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat

semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu,  
*you're all my best friend* pasti rindu kalian semua.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih  
sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin...

**Pekanbaru, 30 Agustus 2013**

**Penulis**

**Rahmat Adi Gunawan**

NIM. 10975007002

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Defenisi pembangunan .....	18
2.1.1 Pembangunan Desa .....	20
2.2 Defenisi masyarakat .....	23
2.3 Defenisi partisipasi .....	24
2.3.1 Bentuk Dan Type Partisipasi Masyarakat.....	28
2.3.2 faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.....	29
2.3.3 Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	31
2.4 Hubungan Partisipasi Dengan Pembangunan.....	33
2.5 Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi .	35
2.6 Ayat alquran tentang partisipasi .....	36
2.7 Defenisi Konsep .....	37
2.8 Konsep Operasional.....	38
2.9 Kerangka Pemikiran .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan waktu Penelitian.....	40
3.2 jenis penelitian.....	40
3.3 Sumber Data .....	40

3.4	Populasi dan Sampel.....	41
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6	Teknik Analisa Data .....	42
3.7	Teknik Pengukuran Data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1	luas dan batas wilayah .....	45
4.2	kependudukan .....	45
4.3	Mata Pencaharian .....	47
4.4	Pendidikan .....	48
4.5	Pemerintahan .....	49
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Identitas Responden.....	54
5.1.1	Jenis Kelamin Responden.....	54
5.1.2	Umur Responden .....	54
5.1.3	Tingkat Pendidikan Responden .....	55
5.1.4	Mata Pencaharian Responden.....	56
5.2	Deskripsi Data Variabel Penelitian .....	57
5.2.1	faktor sosial dan ekonomi .....	57
5.2.2	Faktor Politik .....	62
5.2.3	faktor fisik individu dan lingkungan.....	66
5.2.4	Faktor Nilai Dan Budaya .....	70
5.3	Rekapitulasi Jawaban Responden.....	75
5.3.1	Rekapitulasi Faktor Sosial Dan Ekonomi.....	75
5.3.2	Rekapitulasi Faktor Politik .....	78
5.3.3	Rekapitulasi Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan .	81
5.3.4	Rekapitulasi Faktor Nilai Dan Budaya .....	84
5.4	Rekapitulasi Seluruh Indikator .....	86
5.5	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi .....	91
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
6.1	Kesimpulan.....	92
6.2	Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggara pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahan (legistimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka menghilangkan sentralisme pemerintahan yang bermuara pada pola perencanaan yang bersifat terpusat, dikeluarkan lah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangan selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan landasan yuridis ini memberikan perkembangan positif terhadap otonomi daerah di Indonesia sentralisasi ke desentralisasi. Azas desentralisasi dalam wacana otonomi daerah sangat penting. Karena denganya ia memposisikan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab atas kebijakan penyelenggara pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dengan tetap berada dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas

desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun daerah nya.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (Partisipatif).

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Disamping itu juga diharapkan agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan dapat menciptakan suatu legitimasi bagi sistem pembangunan desa yang efektif.

Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurang nya partisipasi masyarakat, bahkan kasus menunjukan rakyat menentanang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak dan bahkan pada sisi lain dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimasukan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dimaksud kan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Partisipasi merupakan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok lain terkena oleh keputusan-keputusan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dapat menyebabkan pembangunan yang nantinya kurang berjalan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan negeri yang dihadapi dengan alternatif pemecahan yang secara utuh dilaksanakan oleh masyarakat.

Pemikiran perencanaan partisipasi diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakasa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan

partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi sangat luas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Perencanaan partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua stakeholder, dan komitmen ini didapat dari sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan pembangunan program tersebut.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dioptimalkannya partisipasi masyarakat, yakni keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku penyelenggara (*stakholder*). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara, masyarakat, rohaniawan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non pemerintah, dan lain-lain.

Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipasi merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut diatas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan khususnya di desa. Siapapun tak akan pungkiri, desa sebenarnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam gemuruh pembangunan dan politik diseluruh penjuru tanah air. Dari sisi penduduk, desa merupakan basis mayoritas penduduk, ataupun dalam kalimat lain, sebagian penduduk negeri ini menetap di desa. Hal ini memungkinkan desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dan sisi lain menjadi basis massa yang kerap dimobilisasi demi kepentingan politik. Dari sisi sumber daya alam, desa merupakan pemasok utama sumber bahan makanan penduduk kota-kota besar.

Oleh karena itu, pada fase ini sudah selangkahnya perencanaan pembangunan di desa merupakan sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.

Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut baik yang dimulai sejak perencanaan/penentuan aktifitas, pelaksanaan hingga evaluasinya. Pendekatan semacam ini memungkinkan semua aktifitas pembangunan di atas desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dan sesuai dengan konteks setempat (baik kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisiknya).

Jika kita lihat ke belakang, bahwa pola perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (partisipasi) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa didengar. Kita mengenal proses Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kecamatan, lalu diikuti rapat koordinasi pembangunan ditingkat kabupaten hingga Propinsi. Keterlibatan masyarakat dewasa dalam proses perencanaan itu selesai di tingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi ditingkat lebih rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan

mula dari Musrenbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Seperti yang dilihat pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir No.16 Tahun 2008 pada bab 1 pasal 1 poin 7 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yaitu, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No.16 Tahun 2008 pada bab 3 (7) tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang meliputi:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

2. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
3. Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa.

Dalam Perencanaan Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Pasal 8 menyebutkan bahwasannya Rancangan Peraturan yang meyangkut bidang Pembangunan Desa di dalam menyusunnya, Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsuktif dan koordinatif.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 3 tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat merupakan suatu element proses pembangunan oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana.

Pada proses pembangunan desa agar dapat berjalan dengan lancar harus ada partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspek kegiatan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Pembangunan desa tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bila mana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai yang terdepan dengan memiliki kewenangan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakat desa, sehingga yang terjadi adalah kefakuman.

Adapun jumlah masyarakat yang ada di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat jumlahnya pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah penduduk
1	Dusun Sei.Buluh	230	935
2	Dusun Pasar	311	1213
3	Dusun Merdeka	243	839
4	Dusun Sei.Jarum	259	999
5	Dusun Penyemahan	275	1285
Jumlah		1318	5271

*Sumber : Data kantor Desa Pulau Palas, 2013*

Dari tabel 1.1 diatas jumlah keseluruhan penduduk Desa Pulau Palas yaitu 5271 dengan 1318 KK. Semakin banyak masyarakat disuatu desa seharusnya



dapat menunjang kemajuan pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang diatas, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi semakin bagus kemajuan pembangunan di suatu desa tersebut.

Berikut ini jenis pembanguna yang sudah dilakukan pada tahun 2011 dalam rencana kegiatan pembangunan desa (RKP-DES) yang dilaksanakan pada tahun 2011. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 Kegiatan Pembangunan di Desa Pulau Palas Priode 2011 (Perdes No.02/I/DPP/2011 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa)**

No	Kegiatan pembangunan	Sasaran/ Lokasi	Realisasi
1	Perbaikan gedung sekolah	Dusun Sei.Jarum	Terlaksana
2	Penimbunan halaman TK Pembina	Dusun Merdeka	Terlaksana
3	Rehabilitasi puskesmas pembantu	Dusun Penyemahan	Terlaksana
4	Semenisasi jalan	Dusun Merdeka	Belum Terlaksana
5	Pembangunan jembatan	Dusun Merdeka	Belum Terlaksana

*Sumber : Data kantor Desa Pulau Palas, 2013*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas periode 2011 tentang rencana kegiatan pembangunan desa yaitu perbaikan gedung sekolah yang berlokasi di dusun Sei.jarumJenis pembangunan yang dilakukan Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Perdes No.03/I/DPP/2012 tentang rencana pembangunan kegiatan desa (RKP-DES) periode 2012 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3 Kegiatan Pembangunan di Desa Pulau Palas Priode 2012 (Perdes No.03/I/DPP/2012 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa)**

No	Kegiatan pembangunan	Sasaran/ Lokasi	Realisasi
1	Pembangunan turap (tembok pinggir sungai)	Dusun Pasar	Belum Terlaksana
2	Rehabilitasi puskesmas pembantu	Dusun Pasar	Belum Terlaksana
3	Pengadaan mesin fogging	Dusun Penyemahan	Terlaksana
4	Semenisasi jalan	Dusun Merdeka	Belum Terlaksana
5	Pembangunan jembatan	Dusun Merdeka	Belum Terlaksana

*Sumber : Data kantor Desa Pulau Palas, 2013*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembangunan yang dilakukan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan tersebar di beberapa dusun, ada 5 fokus pembangunan yang dilakukan yaitu pembangunan turap (tembok pinggir sungai) dengan sasaran lokasi di dusun pasar yang realisasinya belum terlaksana, rehabilitasi puskesmas yang dilaksanakan di dusun pasar belum terealisasi juga, selanjutnya pengadaan mesin fogging sasaran lokasi di dusun penyemahan sudah terlaksana, semenisasi jalan sasaran lokasi di dusun merdeka belum terlaksana dan pembangunan jembatan lokasi di dusun merdeka sudah belum terlaksana juga.

Selanjutnya di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri hilir terlihat beberapa gejala yang mendukung untuk diadakannya suatu penelitian yaitu :

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa terlihat dari masih rendah nya sumbangan yang

diberikan dalam pembangunan.hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4 Jenis Pembangunan Desa Dengan Menggunakan Dana Swadaya Masyarakat dan Bantuan Pihak Lain**

No	Jenis Pembangunan	Sumbangan Masyarakat	Bantuan Pihak Lain
1	Renovasi Rumah ibadah (masjid)	900.000	10.000.000,-
2	Rehabilitasi Pasar Rakyat	350.000	8.500.000,-
3	Pembuatan Pagar Pustu	-	2.000.000,-
4	Pembuatan lapangan olahraga (badminton)	-	15.000.000,-

*Sumber : Data kantor Desa Pulau Palas, 2013*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya partisipasi masyarakat dalam segi materi untuk pembangunan yaitu renovasi rumah ibadah sumbangan yang di berikan masyarakat sebesar Rp.900.000 sedangkan bantuan dari pihak lain sebesar Rp.10.000.000, kemudian rehabilitasi pasar rakyat sumbangan dari masyarakat sebesar Rp.350.000,- sedangkan dari pihak lain sebesar Rp.8.500.000, selanjutnya pembuatan pagar Puskesmas Pembantu (pustu) sumbangan dari masyarakat tidak ada dan bantuan dari pihak lain sebesar Rp.2.000.000,-, kemudian pembuatan lapangan olahraga (badminton) sumbangan dari masyarakat tidak ada dan sumbangan dari pihak lain sebesar Rp.15.000.000.

Dapat dijelaskan bahwasannya sumbangan atau partisipasi materi yang diberikan oleh masyarakat Desa Pulau Palas masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas. Sumbangan yang diberikan oleh masyarakat masih sangat minim.

Dalam pelaksanaan musyawarah desa melalui mekanisme RPJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang membahas pembangunan dalam jangka 5 tahun kedepan maka RKP-DES (rencana kegiatan pembangunan desa) skala prioritas selama 1 tahun terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. RKP-DES ini terlebih dahulu akan di agendakan menjadi rapat desa, yang nantinya akan membicarakan mekanisme perencanaan pembangunan selama 1 tahun. Pembahasan ini akan dimusyawarah kan terlebih dahulu. Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 LPM beserta perangkat desa lainnya BPD,Karang Taruna,PKK, kepala Dusun,RT dan RW, ketua adat dan masyarakat pada umumnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat daftar hadir peserta rapat RKP-DES tahun 2012 pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.5 Peserta Rapat RKP-DES Pulau Palas Tahun 2012**

No	Peserta Rapat	Jumlah
1.	Kepala desa	1
2.	Sekretaris desa	1
3.	Ketua BPD	1
4.	Ketua LPM	1
4.	PKK	1
5.	Karang Taruna Desa	1
6.	Kepala dusun	5
7.	RW	10
8.	RT	27
9.	Masyarakat lainnya (ketua adat dll)	20
<b>Total</b>		<b>68</b>

*Sumber : Data kantor Desa Pulau Palas, 2013*

2. Kurangnya keterlibatan peserta rapat desa dalam menghadiri rapat RKP-DES (rencana kegiatan pembangunan desa). Rapat membahas tentang rencana kegiatan pembangunan desa diadakan minimal 3 kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah

kehadiran peserta rapat RKP-DES tahun 2012 sebanyak 3 kali dan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 1.6 Daftar Hadir Peserta Rapat RKP-DES Tahun 2012**

No	Tanggal kegiatan rapat	Pelaksanaan Rapat		
		Peserta rapat (orang)	Kehadiran (orang)	Persentase kehadiran (%)
1.	05 Januari 2012	68 orang	31 orang	45.58 %
2	18 Juli 2012	68 orang	26 orang	38,23%
3	10 Oktober 2012	68 orang	28 orang	41,17%

*Sumber data: Kantor Kepala Desa Pulau Palas, 2012*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasannya kehadiran peserta rapat RKP-DES tahun 2012 pada tanggal 5 Desember 2012 dari jumlah peserta rapat 68 orang ternyata jumlah kehadiran peserta rapat hanya 31 orang dengan persentase kehadiran 45.58%. kemudian kegiatan rapat pada tanggal 18 juli 2012 dengan jumlah peserta rapat 68 orang dan yang hadir sebanyak 26 orang atau 38,23%, kemudian rapat desa pada tanggal 10 oktober 2012 dengan jumlah peserta rapat yang sama yaitu 68 orang dan yang hadir mengikuti rapat hanya sebanyak 28 orang atau 41,17%.

Selanjutnya Desa Pulau Palas yang terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu dibandingkan dengan Desa-Desa lainnya merupakan desa yang kurang dalam kegiatan pembangunannya, dari setiap program kegiatan yang dilakukan hanya sedikit yang terealisasi. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.7 Peringkat Desa Dengan Program Desa Yang Terealisasi tahun 2011**

No	Kelurahan/desa	Jumlah kegiatan	
		Perencanaan	Terlaksana
1.	Kelurahan Tembilahan Hulu	6	4
2.	Desa Sialang	3	3
3.	Desa Pulau Palas	5	2
4.	Desa Tempuling	5	3

Sumber : data olahan lapangan, 2013

Maka dengan demikian dapat dikatakan jumlah kehadiran peserta rapat membahas tentang RKP-DES yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun kehadiran peserta rapat tidak sampai setengah dari keseluruhan peserta rapat.

Berdasarkan keterangan dan gejala-gejala yang terjadi seperti yang diterangkan diatas maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis adalah :

1. Mengapa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir rendah?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerinah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui mengapa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir rendah?
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pulas Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang penulis miliki dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa.
- b. Untuk memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa, serta memberikan masukan bagi masyarakat desa khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan peran aktifnya dalam membangun desa.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori, definisi konsep, teknik pengukuran, konsep operasional. Kerangka pemikiran

**BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini meliputi bentuk penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian

**BAB V : HASIL DAN SARAN**

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Merupakan Bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.



**Daftar pustaka**

**Lampiran**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pembangunan**

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Menurut Sondang P. Siagian (2001: 4) Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya menurut Sufian Hamin (2003:56) Pembangunan adalah salah satu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang lebih baik.

Menurut Pratikno (2002: 119) mengemukakan definisi pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup masyarakat.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Menurut suara terbanyak atau jawaban terbaik bahwa pembangunan adalah proses mengubah masyarakat dinegara-negara berkembang secara terencana, transformatif (menjadi lebih baik),

sesuai dengan program –program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan.

Dalam prakteknya, karena kebijakan ini bersifat politik maka pembangunan lekat dengan ideologi tertentu, dalam hal ini adalah kebijakan kapitalisme, yang relatif liberal dan menganut ekonomi pasar. Menurut bahasa indonesia pembangunan berasal dari bahasa “bangun” yang artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, pembuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi :

- a. Ia berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
- b. Ia mencakup keadilan (equity) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.

Pertumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Sondang P. Siagian (2001:4) mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup :

- a. Pembangunan dibidang politik
- b. Pembangunan dibidang ekonomi
- c. Pembangunan dibidang sosial budaya

d. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang sangat mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara kelesuruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipal, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi , infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu sangat penting, karena dengan adanya pembangunan akan memudahkan pertumbuhan bagi negara Republik Indonesia baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik.

### **2.1.1 Pembangunan Desa**

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik

Indonesia. Sedangkan menurut Sutardjo Kartodikusuma sebagaimana dikutip oleh Ahmadi (2003: 241) menjelaskan definisi desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Desa berdasarkan pemerintahan No.72 tahun 2005 adalah desa, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pada pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Desa memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan pembangunan, sebab desa merupakan struktur pemerintah terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Segala jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa. Dengan semangat desentralisasi masyarakat harus diberikan ruang untuk ambil bagian dalam skema perencanaan desa. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan

sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006: 20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*).
2. Sasaran pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuatan lembaga.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja baru, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

## 2.2 Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Selanjutnya, menurut Ralf Linton (dalam Abdul Syani, 2002: 31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasi dirinya dengan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang hidup bersama adalah sebagai berikut:

- a. Bercampur untuk waktu lama
- b. Mereka sadar bahwa mereka adalah kesatuan.
- c. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Menurut Harold J. Laski (dalam Budiarto, 2004: 34), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus diataati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan yang terjaga keamanannya. Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J. Laski dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia, agar terjaga dan terpelihara dari ancaman-ancaman yang merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan (hukum), manusia merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Lasswell (dalam Budiarjo. 2004), mengamati kehidupan masyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat memperinci delapan nilai yang diingi yaitu:

1. Kekuasaan
2. Pendidikan/peneranga
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih saying
7. Kejujuran
8. Keseganan

### **2.3 Partisipasi**

Partisipasi sebenarnya adalah merupakan istilah dalam bidang manajemen, namun saat ini telah lebih berkembang luas bukan monopoli ilmu manajemen saja, dalam artian istilah partisipasi itu sudah umum dan dalam arti yang luas, istilah ini sebenarnya diambil dari bahasa asing "*participation*", yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan, peranserta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriah.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk penumbuhan dan



pengembangan partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat sulit diajak maju oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Sejumlah pakar memberikan batasan tentang konsep Partisipasi, diantaranya Mubyarto ( 2000 : 54 ) yang membatasi Partisipasi sebagai kesadaran untuk membuat berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Pra sarat untuk

memunculkan Partisipasi adalah adanya rasa tanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, persaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2008: 18)

Gaventa dan Valderama (dalam Arsito, 2004: 45), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi Politik, *Political Participation* lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial, *Social Participation* ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak di

luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

3. Partisipasi Warga, *Citizen Participation* menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum terisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Menurut Dusseldorp yang dikutip oleh Miriam Budihardjo (dalam syaprizal ,2007 : 30) mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat adalah dengan melihat bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dalam perumusan tujuan sampai tahap penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy* mempengaruhi demokrasi sehingga kualitas dari

hirarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan maupun kefasihan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat bersangkutan.

### **2.3.1 Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Hamijoyo (dalam Abu Huraerah, 2007: 21) Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebut diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk

1. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan
2. Partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata. Bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi berupa buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan.

Menurut Notoatmodjo (2007: 98), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni:

1. Manpower (tenaga)

Bantuan tenaga yang diberikan seperti turut serta dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan, gotong royong, dsb

2. Money (uang)

Berupa bantuan yang bersifat swadaya masyarakat yang nantinya akan di gunakan untuk mendanai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3. Material (benda-benda)

Peranan masyarakat berupa bantuan logistik dan perlengkapan pembangunan seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya

4. Mind (ide)

Ide atau gagasan yang diberikan disaat musyawarah yang nantinya akan dijadikan ide pokok dalam perencanaan pembangunan.

### **2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Menurut Notoadmodjo (2007: 100), ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi, adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan.

2. Faktor politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

a. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik.(Dan Nimmo 2000:8)

b. Kesadaran politik.

Kesadaran Politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Menurut (Miriam Budihardjo 1985:119).

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan fisik individu, jenis kelamin kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok.

4. Faktor Nilai dan Budaya

Nilai budaya politik atau *sivic culture* merupakan bisnis yang membentuk demokrasi, pada hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Menurut Plumer (dalam suryawan, 2004: 27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;

2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikit punya waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

### **2.3.3 Prinsip-Prinsip Partisipasi**

UNDP (*United Nations Development Programme*) seperti yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam *Good Governance* yaitu negara

atau pemerintah, *private sektor* atau swasta, dan *civil society* atau masyarakat. Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya *good governance*. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif sedangkan *private sektor* memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga dapat dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat civil berperan untuk memfasilitasi interaksi-inteaksi sosial politik dan mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan prinsip-prinsipnya menurut UNDP seperti yang dikutip oleh Syamsuddin Haris (2007: 57-59) adalah sebagai berikut:

1. *Participation*; setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of law*; aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan secara hukum.
3. *Transparancy*; yaitu kebebasan arus informasi ; dapat diketahui, di monitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga pemerintah.
4. *Responsiveness*; lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stake holder-nya.
5. *Consensus orientation*: berorientasi pada kesepakatan yaitu bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan pihak yang lebih luas.



6. *Equity*; kesetaraan, semua warga negara baik, laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status, miskin, kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan persamaan.
7. *Effectiveness and efficiency*; setiap proses kegiatan, aktifitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai garis yang sudah ditetapkan.
8. *Accountability*; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab pada publik dan lembaga *stakeholdernya*.
9. *Strategic vision*; visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan SDM yang luas dan jauh kedepan sesuai dengan keperluan pembangunan

#### **2.4 Hubungan Partisipasi Dengan Pembangunan**

Pembangunan yang menyangkut pengertian bahwa manusia adalah sebagai objek dan subjek pembangunan. Karena manusia sebagai subjek pembangunan maka dia harus diperhitungkan. Oleh karena itu perlu mengajak subjek tadi berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sering kita mendengar bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat mendapat sambutan masyarakat, hal ini meminta pemimpin memiliki persepsi yang tajam dalam mendeteksi keinginan masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi aktif dalam masyarakat mengambil bentuk aksi sosial bukan tindakan sporadis. Oleh karena itu selalu diusahakan derajat kelanggengan atau perbandingan menetap agar aksi sosial dapat bergerak luas dan cukup lama. Aksi

sosial demikian menjadi gerakan sosial dan gerakan sosial ini akan banyak melibatkan banyak orang. Lebih luasnya pengorganisasian jaringan komunikasi yang teratur. Dalam gerakan sosial unsur kesukarelaan merupakan hal penting dimana jika sudut pandang pemicaraannya partisipasi berarti meneliti unsur sifat, tujuan dan cara.

Sebenarnya lembaga swadaya masyarakat memiliki potensi besar dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan yaitu: pertama, berdasarkan pengetahuan atas masyarakatnya mereka dapat memberikan masukan yang tepat bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan baik berupa prasarana, pelayanan serta peningkatan ekonomi untuk mengembangkan usaha masyarakat kecil sesuai dengan tingkat aspirasi masyarakat. Kedua, berdasarkan hubungan kedekatannya dengan masyarakat tentu dapat pula membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih tinggi. Ketiga, berdasarkan kedudukan pula lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi komunikator dan fasilitator yang efektif menghubungkan keinginan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sehingga gerak pembangunan dari ketiga pembangunan tersebut lebih serasi.

Akhirnya upaya untuk meningkatkan pembangunan membutuhkan peran serta seluruh komponen yang dianggap mampu menggerakkan dan menmbuh kembangkan pembangunan yang yang berbasis partisipatif dengan kesesuaian kesepakatan dalam makna dan tujuan.

## **2.5 Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi**

Menurut Veitzal Rivai (2004: 148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam kondisi tertentu. Peranan pemerintah desa dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai pemerintah desa.

Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Veitzal Rivai, 2004: 53). Secara operasional fungsi pemerintah desa dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

### **1. Fungsi instruksi**

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dikerjakan secara efektif.

### **2. Fungsi partisipatif**

Dalam menjalankan fungsi pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

### **3. Fungsi delegasi**

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah, fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. (Taliziduhu Ndraha, 2008: 18).

Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini yaitu:

- a. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan
- c. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan
- d. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk manumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kepada masyarakat haruslah diberikan informasi tentang arti pentingnya pembangunan melalui kegiatan komunikasi, adaptasi, kerjasama yang nantinya masyarakat akan mengerti dan memahami hakikat penting nya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## 2.6 Ayat Al-quran Tentang Partisipasi

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-rum:41)

## **2.7 Defenisi Konsep**

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). Tujuannya adalah Untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang akan diteliti. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pembangunan**

Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa . pembangunan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah pembangunan fisik baik itu infrastruktur ataupun non infrastruktur. Pembangunan yang diprioritaskan dan dilaksanakan pada tahun 2011-2012 di Desa Pulau Palas.

### **2. Partisipasi**

Keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Partisipasi yang dimaksud disini adalah berupa bantuan yang berwujud atau pun tidak berwujud.

### **3. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama, yang mana mereka

hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dan harus diataati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan yang terjaga keamanannya.yang menjadi fokus pada penelitian disini adalah masyarakat yang sudah berkeluarga dan berdomisili di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

## 2.8 Konsep Operasional

Menurut Singarimbun (1995:46) konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Variabel penelitian pada penulisan ini merujuk pada teori Notoadmodjo (2007 :100) tentang bentuk kontribusi masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Konsep operasionalnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

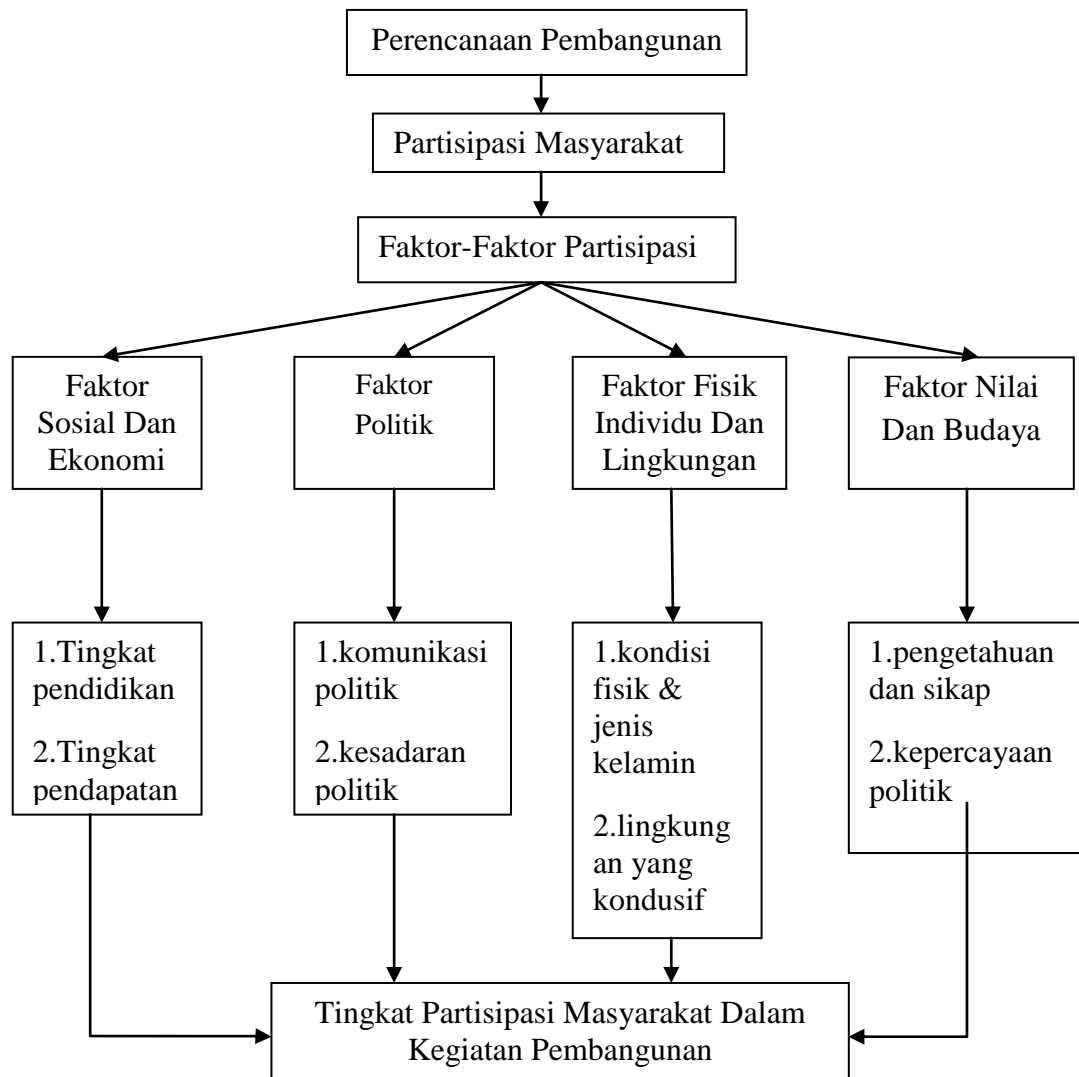
**Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Defenisi konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat pembangunan	Partisipasi	a. Faktor sosial Ekonomi  b. Faktor Politik  c. Faktor fisik individu dan lingkungan  d. Faktor nilai dan budaya	a. Tingkat pendidikan b. Tingkat pendapatan  a. Komunikasi politik b. Kesadaran politik  a. Kondisi fisik dan jenis kelamin b. Lingkungan yang kondusif  a. Pengetahuan dan sikap b. kepercayaan politik.

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2013*

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



*Sumber : Data Olahan Penelitian,2013*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan waktu penelitian**

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di sebuah desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 5271 jiwa atau 1318 KK dan juga merupakan Desa terujung dari Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan pintu gerbang untuk masuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Yaitu Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari s/d Mei 2013.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Menurut **Sugiono (2003: 11)** jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **3.3 Sumber Dan Jenis Data**

##### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan wawancara, dan kuesioner.



## **2. Data skunder**

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berupa data yang diolah atau olahan dari objek penelitian.

### **3.4 Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Rosady Ruslan,2003:135).

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang tercatat sebagai warga Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **2. Sampel**

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2003:91). Dalam menarik sampel peneliti menggunakan teknik *proportionate Stratified Random Sampling*, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota /unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional. Maka apabila subeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-25% atau lebih dari jumlah populasi (Arikunto, 2006: 134). Maka penarikan sampel pada penelitian ini adalah 10% dari masing-masing jumlah populasi. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1 Sampel Propotional Stratified Random Sampling**

No	Nama dusun	Jumlah kk	Sampel (10%)
1.	Dusun Sei Buluh	230	23
2.	Dusun pasar	311	31
3.	Dusun merdeka	243	24
4.	Dusun sei. jarum	259	25
5.	Dusun penyemahan	275	27
<b>Jumlah</b>		<b>1318</b>	<b>130</b>

Dari tabel diatas maka jumlah sampel yang didapat dari masing-masing Dusun dianggap mewakili untuk dijadikan sampel pada penelitian ini. Adapun jumlah keseluruhan dari sampel tersebut adalah sebanyak 130 KK/orang.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. wawancara yaitu mengadakan penelitian tanya jawab kepada responden mengenai permasalahan yang hendak diteliti demi kesempurnaan data yang diperoleh. Data wawancara dapat penulis peroleh dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun serta tokoh masyarakat.
2. Quesioner yaitu peneliti menunjukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Quesioner disebarkan kepada masyarakat desa Pulau Palas kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

### **3.6 Analisis Data**

Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor partisipasi masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dalam kegiatan pembangunan, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu

analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

### **3.7 Teknik Pengukuran Data**

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert **Sugiono (2005:107)**. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor:

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| a. Sangat Tinggi /sangat berpengaruh  | : 5 |
| b. Tinggi / berpengaruh               | : 4 |
| c. Cukup Tinggi / cukup berpengaruh   | : 3 |
| d. Kurang tinggi / kurang berpengaruh | : 2 |
| e. Tidak tinggi / tidak berpengaruh   | : 1 |

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh : 76-100 %

Cukup Setuju/cukup berpengaruh : 56-75 %

Tidak Setuju/tidak berpengaruh : 40-45 %

Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh: 0-39 %.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Luas Dan Batas Wilayah**

Desa pulau palas terletak dikecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 52 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) dusun yaitu, dusun merdeka, dusun pasar, dusun sei.buluh, dusun penyemahan dan dusun sei.jarum. ditinjau dari letak geografisnya desa pulau palas mempunyai batas wilayah yaitu :

1. Sebelah utara : Dusun Sialang Panjang
2. Sebelah selatan : sungai indragiri, dusun sungai intan
3. Sebelah barat : kelurahan tempuling
4. Sebelah timur : kelurahan tembilahan barat

Sedangkan desa pulau palas terletak dikota kecamatan, jarak dari kabupaten dan propinsi sebagai berikut :

1. Jarak dari pusat peemrintahan kabupaten 12 km
2. Jarak dari pusat pemerintahan propinsi 3000 km

#### **4.2 Penduduk**

Masyarakat desa pulau palas merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain banjar, jawa, batak, melayu dan minang. Masyarakat desa pulau palas mayoritas adalah banjar dan melayu. untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pulau Palas Berdasarkan Suku**

No	Jenis suku	Jumlah	Persentase
1	Banjar	3208	60,86 %
2	Melayu	1043	19,79%
3	Jawa	508	9.64%
4	Minang	409	7.75%
5	dll	103	1.94%
<b>Jumlah</b>		5271	100%

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang bersuku bugis lebih tinggi dari pada suku melayu, jawa, minang dengan jumlah 3208 orang atau (60.86%) yang bersuku banjar di desa pulau palas. Suku melayu dengan jumlah 1043 orang atau (19.79%), selanjutnya suku jawa dengan jumlah 508 orang atau (9.64%). Dan minang 409 orang atau (7.75%) dan suku suku lainnya yang mendiami wilayah pulau palas sebanyak 103 orang atau (1.94%).

Berdasarkan data statistik pada kantor kepala desa pulau palas tahun 2012, jumlah penduduk desa pulau palas berjumlah 1318 KK dan keseluruhan 5271 orang. Terdiri dari laki-laki 2739 jiwa dan perempuan 2532 jiwa dari 1318 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Penduduk Desa Pulau Palas Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	persentase
1	Laki-laki	2739	51.9%
2	Perempuan	2532	48.4%
<b>Jumlah</b>		5271	100%

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa Hutan Panjang menurut umur.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulau palas Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	0-5 Tahun	399	7.57% %
2.	6-15 Tahun	1035	19.63%
3.	17-25 Tahun	1382	26.21%
4.	26-55 Tahun	2195	41.64%
5.	60 Tahun keatas	260	4.93%
<b>JUMLAH</b>		5271	100%

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Dari tabel tersebut diatas terlihatlah bahwa keadaan penduduk Desa pulau Palas di lihat dari usia 26-55 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 2195 jiwa atau 41,64 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 60 tahun keatas dengan jumlah 260 jiwa atau 4.93% dari jumlah penduduk Desa pulau palas.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Desa pulau palas berdasarkan agama:

**Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Desa Pulau Palas berdasarkan Agama.**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	5247	99.54%
2.	kristen	15	0.28%
4.	Budha/Hindu	9	0.12%
<b>Jumlah</b>		5271	100%

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Dari data diatas dapat dikatakan masyarakat desa Pulau palas penduduk nya mayoritas beragama islam dengan jumlah 5247 atau (99.54%), dan selebihnya agama kristen dengan 15 orang atau (0.28%) dan budha 9 orang atau (0.12%).

#### **4.3 Mata Pencaharian**

Desa pulau palas daerah yang terletak pada daerah dataran rendah dan terletak dipinggiran sungai sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan nelayan. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Pulau Palas

memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan dan bekerja sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Pulau Palas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Pulau Palas**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	975	46.34 %
2.	Nelayan	860	40.87 %
3.	PNS	21	0.99 %
4.	Pedagang	64	3.01 %
5.	Peternak	16	0.76 %
6.	Karyawan pabrik	140	6.65 %
7	Lain-lain	28	1.33 %
<b>Jumlah</b>		<b>2104</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Pulau Palas adalah bermata pencaharian petani yakni sebanyak 975 orang atau 46,34 %, bekerja sebagai nelayan sebanyak 860 orang atau sekitar 40,87 %, sebagai PNS sebanyak 21 orang atau 0,99 %, pedagang sebanyak 64 orang atau sekitar 3,01 %, bekerja sebagai peternak 16 orang atau sekitar 0,76 %, sebagai karyawan pabrik 140 orang atau sekitar 6.65 %, dan pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, usaha cucian mobil dan sepeda motor, dll sebanyak 28 orang atau sekitar 1,33 %.

#### **4.4 Pendidikan**

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Pulau Palas menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau



tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Tingkat Pendidikan**

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Buta aksara dan angka	68	1.29 %
2.	Belum sekolah	401	7.60 %
3.	Tidak tamat SD	503	9.54 %
4.	Tamat sekolah dasar	1430	27.12 %
6.	SLTP/ sederajat	1050	19.92 %
7.	SLTA/ sederajat	910	17.26 %
8.	Akademi	3	0.05 %
9.	sarjana	6	0.11 %
<b>Jumlah</b>		<b>5271</b>	<b>100%</b>

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Dilihat pada tabel 4.6 diatas tingkat pendidikan penduduk Desa Pulau Palas yang paling besar adalah tamat sekolah dasar berjumlah 1430 orang atau 27,12 %, kemudian yang belum sekolah 401 orang atau 7,60 %, tidak tamat SD berjumlah 503 orang atau 9,54 %, selanjutnya tamat SLTP sederajat berjumlah 1050 orang atau 19,92 %, selanjutnya tamat SLTA sederajat berjumlah 910 orang atau 17,26 %, untuk masyarakat yang mendapat ilmu akademik berjumlah 3 orang atau 0,05 % dan sarjana berjumlah 6 orang atau 0,11 %.

#### **4.5 Pemerintahan**

Desa pulau palas adalah salah satu desa yang berpedoman pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa. Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Dan selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya

dipimpin oleh kepala dusun, RW dan RT. Adapun jumlah aparat pemerintah desa pulau palas dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

**Tabel 4.7 Aparat Pemerintah Desa Pulau Palas**

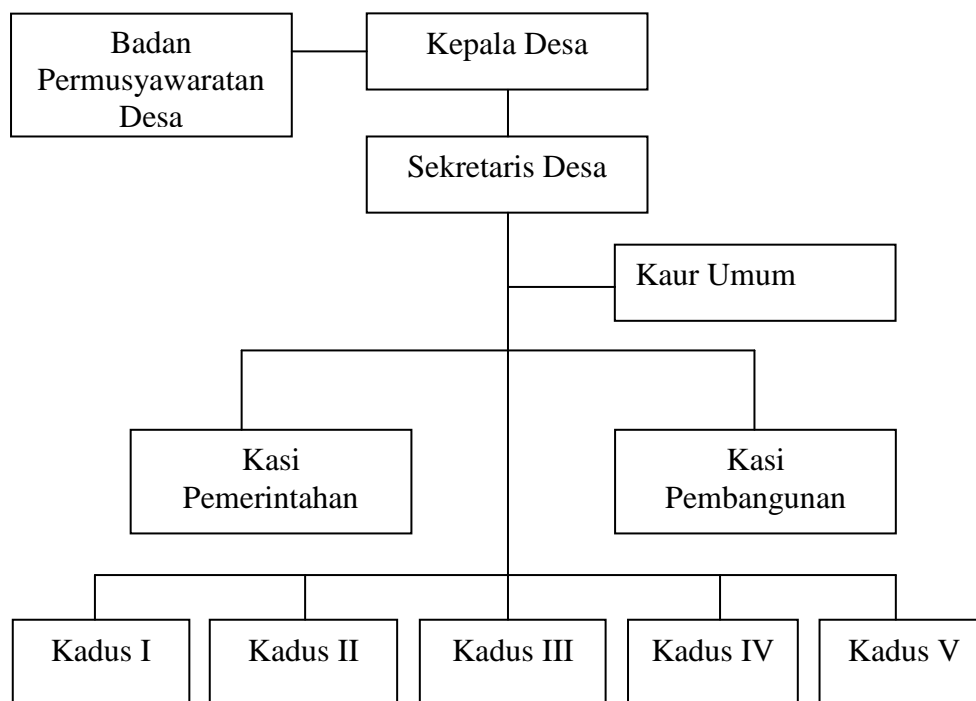
No	Aparat Pemerintah	Jumlah
1.	Kepala desa	1
2.	Sekretaris desa	1
3.	Kepala dusun	5
4.	Rukun warga	10
5.	Rukun tetangga	27
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>

*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Berikut ini struktur organisasi Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir :

**Gambar 4.8 Struktur Organisasi Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**



*Sumber data: Kantor kepala Desa Pulau Palas Tahun 2013*

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Kepala Urusan (Kaur)

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

### 4. Kepala Seksi (Kasi)

- a. Kepala seksi adalah unsure pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu kepala desa dalam urusan teknis tertentu.
- b. Kepala seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Kepala seksi mempunyai fungsi menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

### 5. Kepala Dusun (Kadus)

- a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
- b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa

- d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kaupaten Indragiri Hilir terdapat 5 dusun, yaitu:

- 1. Dusun Sei. Buluh
- 2. Dusun Pasar
- 3. Dusun Merdeka
- 4. Dusun Sei. Jarum
- 5. Dusun penyemahan

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

##### 5.1.1 Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1.1 Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	105	80,76%
2.	Perempuan	25	19,23%
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data olahan lapangan, 2013*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 130 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 105 responden laki atau 80,76%, sedangkan responden perempuan sebanyak 25 orang responden atau 19,23%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat desa Pulau Palas adalah 130 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 106 orang atau 80,76%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga.

##### 5.1.2 Umur Responden

Untuk mengetahui umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2 Tingkat Umur Responden**

No	Tingkat umur	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	17-25 tahun	20	15,38%
2.	26-34 tahun	38	29,23%
3.	35-43 tahun	56	43,07%
4.	44 tahun keatas	16	12,30%
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100%</b>

*Sumber: data olahan lapangan, 2013*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 35-43 sebanyak 56 responden atau 43,07%. Tingkat umur 17-25 sebanyak 20 responden atau 15,38%, kemudian tingkat umur 26-34 sebanyak 38 responden atau 29,23%, dan tingkat umur 44 tahun keatas berjumlah 16 orang responden atau 1230%.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

### **5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden**

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikan sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidkan responden dalam penelitian ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1.3 Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	20	15,38%
2.	SMP/ sederajat	69	53,07%
3.	SLTA/ sederajat	33	25,38%
4.	Perguruan tinggi	8	6,15%
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan lapangan, 2013*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 130 responden dengan berbagai tingkat pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tamat SD sebanyak 20 responden atau 15,38%, tamat SMP/ sederajat sebanyak 69 responden atau 53,07%, tamatan SLTA/ sederajat sebanyak 33 responden atau 25,38% dan yang mempunyai latar belakang lulusan perguruan tinggi sebanyak 8 responden atau 6,15%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas pendidikan responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD, dengan demikian variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai SD,SMP,SLTA dan juga ada yang dari perguruan tinggi.

#### **5.1.4 Mata Pencapaian Responden**

Berikut ini adalah data responden dilihat dari mata pencapaian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :



**Tabel 5.1.4 Jenis Mata Pencanharian Responden**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	56	43,07%
2.	Nelayan	19	14,61%
3.	Pedagang	27	20,76%
4.	PNS	10	7,69%
5.	Dan lain-lain	18	13,84%
<b>jumlah</b>		<b>130</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data olahan lapangan, 2013*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah petani yaitu 56 orang atau 43,07%, nelayan sebanyak 19 orang atau 14,61%, pedagang sebanyak 27 orang atau 20,76%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang atau 7,69%, dan responden dengan pekerjaan yang lain seperti bengkel, cuci motor sebanyak 18 responden atau 13,84%.

## **5.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Pulau Palas**

Menurut Notoadmodjo (2007:100), mengatakan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

### **5.2.1 Faktor Sosial dan ekonomi**

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada. Mereka dari tingkat pendidikan yang cenderung memiliki keterikatan moral terhadap pelaksanaan pembangunan. tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih memiliki tanggung jawab yang lebih dalam proses pembangunan.

Pendidikan sangat terkait dengan aktivitas mulia manusia yang tugas utamanya adalah membantu pengembangan humanitas manusia untuk menjadi manusia yang berkepribadian mulia utama menurut karakteristik idealitas manusia yang diinginkan. Aktivitas mulia yang termasuk pada pendidikan ini juga berbentuk partisipasi masyarakat yang juga mempunyai pengaruh. Kemudian untuk lebih jelasnya jawaban responden tentang tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat kita lihat pada tabel berikut :

**Tabel V.1 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Sosial dan Ekonomi Dengan Sub Indikator Tingkat Pendidikan**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tingkat pendidikan dalam partisipasi	35	45	22	15	13	130
		<b>26,9%</b>	<b>34,6%</b>	<b>16,9%</b>	<b>11,5%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
2.	Pendidikan yang tinggi	21	25	68	12	4	130
		<b>16,1%</b>	<b>19,2%</b>	<b>52,3%</b>	<b>9,2%</b>	<b>3,7%</b>	<b>100%</b>
3.	Pendidikan mempengaruhi lingkungan	16	29	37	42	6	130
		<b>12,3%</b>	<b>22,3%</b>	<b>28,4%</b>	<b>32,3%</b>	<b>4,6%</b>	<b>100%</b>
Jumlah		<b>72</b>	<b>99</b>	<b>127</b>	<b>69</b>	<b>23</b>	<b>390</b>
Persentase (%)		<b>18,4%</b>	<b>25,4%</b>	<b>32,5%</b>	<b>17,6%</b>	<b>15,9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.1 diatas, distribusi jawaban responden mengenai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor sosial dan ekonomi dengan Sub indikator tingkat pendidikan adalah sebanyak 18,4% menyatakan sangat setuju/berpengaruh, kemudian sebanyak 25,4% menyatakan setuju atau

berpengaruh. Sebanyak 32,5% menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 17,6% menjawab kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 15,9% menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh tingkat pendidikan terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, maka persentase tertinggi ada pada tingkat cukup setuju/cukup berpengaruh yakni 32,5% yang menyatakan tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Dari data tabel dan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden cukup setuju dengan tingkat pendidikan cukup mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pendidikan tidak menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, hal ini sejalan dengan hasil pengolahan data diatas. Dimana tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin masyarakat lebih aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Pulau Palas yaitu Bapak Kursani yang mengatakan:

“karena tingkat pendidikan disini sudah lumayan bagus, maka diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu akan meningkat, sehingga masyarakat tadi sadar dan paham akan penting nya pendidikan dalam kegiatan pembangunan”tetapi yang menjadi masalah ternyata tidak menjadi jaminan mereka yang punya pendidikan yang tinggi cenderung berperan aktif dalam kegiatan pembangunan .(wawancara 17-05-2013).

Data ini sesuai pada tabel 4.6 tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang mana jumlah penduduk yang tidak mengenyam bangku pendidikan hanya sebanyak 68 orang atau 1,29%. Dan selebihnya sedang dan pernah mengenyam bangku pendidikan.

#### **b. Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan dan penghasilan seseorang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang dalam kegiatan pembangunan. Seseorang dengan pendapatan yang cukup diharapkan lebih memiliki tanggung jawab yang lebih didalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya terkait pekerjaan dan penghasilan memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Sosial dan Ekonomi Dengan Sub Indikator Tingkat Pendapatan**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Pekerjaan dan penghasilan	21	69	20	9	11	130
		<b>16,1%</b>	<b>53,7%</b>	<b>15,3%</b>	<b>6,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>100%</b>
2.	Ekonomi yang mapan	28	61	19	12	10	130
		<b>21,5%</b>	<b>46,9%</b>	<b>14,6%</b>	<b>9,2%</b>	<b>7,6%</b>	<b>100%</b>
3.	Pendapatan/ penghasilan yang diterima	18	45	31	21	15	130
		<b>13,8%</b>	<b>34,6%</b>	<b>23,8%</b>	<b>16,1%</b>	<b>11,5%</b>	<b>100%</b>
Jumlah		<b>67</b>	<b>175</b>	<b>70</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>390</b>
Persentase (%)		<b>17,1%</b>	<b>44,8%</b>	<b>17,9%</b>	<b>10,7%</b>	<b>9,2%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.2 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor sosial dan ekonomi dengan Sub indikator tingkat pendapatan yaitu yang menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh sebanyak 17,1%, kemudian sebanyak 44,8% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, sebanyak 17,9% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 10,7% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 9,2% responden menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh tingkat pendapatan terhadap rendahnya tingkat partisipasi.

Dari penjelasan diatas, maka persentase tertinggi tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dengan indikator tingkat pendapatan adalah pada tingkat setuju atau berpengaruh yaitu sebanyak 44,8%.

Dari penjelasan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dengan kata lain semakin sejahtera seseorang akan mempengaruhinya tingkat partisipasinya dalam kegiatan pembangunan, begitu sebaliknya ketika tingkat pendapatan rendah tingkat partisipasi masyarakat akan rendah juga.

Hal ini sesuai pada data tabel 4.5 tentang mata pencaharian masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu yaitu mayoritas masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani yaitu dengan persentase 46,34%. Dengan masyarakat desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tradisional dan tingkat pendapatannya pun tergolong rendah maka akan berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Dan hal

ini terbukti dengan jawaban responden mengenai tingkat pendapatan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Data diatas didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Pulau Palas yaitu Bapak Kursani yang mengatakan:

“masyarakat Desa Pulau Palas mayoritas adalah bekerja sebagai petani, nelayan dan pekerja serabutan, pada umumnya mereka masih petani tradisional, nelayan pun begitu, sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh pun belum optimal hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Dan secara tidak langsung tingkat partisipasi mereka pun akan rendah. .(wawancara 17-05-2013)

### **5.2.2 Faktor Politik**

#### **a. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik yang baik dari pemerintah atau sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang sistem pemerintahan dan birokrasi maka hendaknya pemerintah berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.3 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Politik Dengan Sub Indikator Komunikasi Politik**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Komunikasi politik yang baik	61	35	18	10	6	130
		46,9%	26,9%	13,8%	7,6%	4,6%	100%
2.	Sosialisasi	85	23	8	3	11	130
		65,3%	17,6%	6,1%	2,3%	8,4%	100%
3.	Pemerintah berperan aktif	89	21	19	1	0	130
		68,4%	16,1%	14,6%	0,7%	0%	100%
	Jumlah	<b>235</b>	<b>79</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>390</b>
		<b>60,2%</b>	<b>20,2%</b>	<b>11,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,3%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.3 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor politik dengan sub indikator komunikasi politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebanyak 60,2% responden menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 20,2% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, sebanyak 11,5% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 3,5% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 4,3% responden menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh komunikasi politik terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase terbesar yaitu 60,2% responden yang menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh tentang komunikasi politik mempengaruhi rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Dengan demikian ketika komunikasi politik yang dilakukan dari pemerintah itu bagus secara otomatis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya disaat pemerintah kurang mengadakan sosialisasi tentang perencanaan partisipatif dalam kegiatan pembangunan maka tingkat partisipasi masyarakat akan rendah. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menjawab sangat setuju atau sangat berpengaruh komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

#### **b. Kesadaran Politik**

Disamping peranan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat faktor internal dari individu juga berperan penting didalam meningkatkan partisipasinya, ketika peran pemerintah kurang maksimal maka kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan itu sangat diharapkan. Hendaknya masyarakat menaruh perhatian terhadap kegiatan pembangunan, sehingga kesadaran ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita pada tabel dibawah ini :



**Tabel V.4 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Politik Dengan Sub Indikator Kesadaran Politik**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Masyarakat menaruh perhatian	49	27	19	4	31	130
		37,6%	20,7%	14,6%	3,7%	23,8%	100%
2.	Rasa ingin tahu masyarakat	38	44	15	19	14	130
		29,2%	33,8%	11,5%	14,6%	10,7%	100%
3.	Pengetahuan tentang sistem pemerintah dan birokrasi	28	64	19	11	8	130
		21,5%	49,2%	14,6%	8,4%	6,1%	100%
	Jumlah	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>390</b>
		<b>29,4%</b>	<b>34,6%</b>	<b>13,5%</b>	<b>8,7%</b>	<b>13,5%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.4 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor politik dengan sub indikator kesadaran politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi dalam kegiatan pembangunan adalah sebanyak 29,4% responden menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 34,6% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, kemudian 13,5% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh. Sebanyak 8,7% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 13,5% responden menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh faktor politik dengan sub indikator kesadaran politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang faktor politik dengan sub indikator kesadaran politik dengan persentase jawaban terbesar yaitu menyatakan setuju atau berpengaruh sebesar 34,6%, kemudian persentase terkecil berada pada skala kurang setuju atau kurang berpengaruh yakni 8,7%. Dengan demikian sub indikator kesadaran politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah berpengaruh.

Ketika masyarakat merasa ingin tahu dengan tentang suatu pembangunan akan berdampak kepada turut berpartisipasi dalam kegiatan pembanguna tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Pulau Palas Bapak Kursani, beliau berkata :

“disini lah beratnya prinsip partisipatif dalam pembangunan itu mau dilaksanakan, karena pemicu lain dari partisipasi masyarakat disini adalah hasrat ingin tahu tentang pembangunan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa itu masih sangat rendah, sehingga aparat desa harus ekstra apabila ingin melibatkan masyarakat dalam konteks partisipasi yang dibutuhkan” (wawancara 17-05-2013).

Dengan demikian kesadaran politik yang baik hendaknya sejalan dengan komunikasi politik yang baik dari pemerintah, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat serta pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan berjalan dengan lancar.

### **5.2.3 Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan**

#### **a. Kondisi Fisik Dan Jenis Kelamin**

Manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi antar sesama manusia lebih maksimal apabila dalam keadaan sehat jasmani dan juga rohani. Ketika seseorang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani seala sesuatu hal

dapat dilakukan termasuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi masyarakat Berdasarkan Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan Dengan Sub Indikator Kondisi Fisik Dan Jenis Kelamin**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Kondisi fisik	95	18	2	7	8	130
		73,1%	13,8%	1,5%	5,5%	6,1%	100%
2.	Diskriminasi terhadap kondisi yang tidak sempurna	10	27	18	34	41	130
		7,6%	20,7%	13,8%	26,1%	31,5%	100%
3.	Jenis kelamin	25	64	10	16	15	130
		19,2%	49,2%	7,6%	12,3%	11,5%	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>130</b>	<b>109</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>64</b>	<b>390</b>
		<b>33,3%</b>	<b>27,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>14,6%</b>	<b>16,4%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.5 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor fisik individu dan lingkungan dengan sub indikator kondisi fisik dan jenis kelamin mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebanyak 33,3% menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 27,9% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, sebanyak 7,6% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 14,6% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 16,4% responden menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh faktor fisik dan individu dan

lingkungan dengan sub indikator kondisi fisik dan jenis kelamin berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, maka faktor kondisi fisik dan lingkungan dengan sub indikator kondisi fisik dan jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Hal ini sesuai dengan jawaban tertinggi responden yaitu sebesar 33,3% berada pada skala sangat berpengaruh.

Disaat seseorang dalam keadaan fisik yang prima maka dia akan bisa melakukan apapun termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dari keterangan diatas mayoritas responden menyatakan sangat setuju. Karena disaat seseorang dalam kondisi fisik yang tidak prima maka kecendrungan untuk melakukan sesuatu itu sangat kecil dan bahkan tidak bisa. Dan jenis kelamin masih menjadi faktor dominan kegiatan partisipasi, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel diatas bahwasannya kaum laki-laki lebih dominan didalam kegiatan partisipasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sekeretaris desa pulau palas bapak Kursani, beliau mengatakan bahwa :

“ia benar, jenis kelamin masih menjadi faktor yang dominan dalam kegiatan disini, biasanya para bapak-bapak yang memiliki tanggung jawab yang lebih dari pada ibu-ibu. Kalau pun Kaum ibu-ibu kita libatkan, itu biasanya dalam kondisi tertentu saja. Tidak semua kegiatan bisa kita libatkan,karena keterbatasan yang ada pada kaum perempuan(wawancara 17-05-2013).

#### **b. Lingkungan Yang Kondusif**

Ketika Kondisi lingkungan kondusif disuatu dilingkungan tempat tinggal maka ketentraman akan dirasakan oleh semua masyarakat. Dan hal ini akan

berdampak kepada kelancaran disetiap pembangunan yang ada. Masyarakat akan lebih tenang dan nyaman ketika hendak menjalankan aktifitas dan kegiatan partisipasi. Adapun jawaban responden tentang lingkungan yang kondusif mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan pembangunan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan Dengan Sub Indikator Lingkungan Yang Kondusif**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Lingkungan yang kondusif	20	54	27	19	10	130
		5,3%	41,5%	20,7%	14,6%	7,6%	100%
2.	Jaminan rasa aman	22	56	13	21	18	130
		16,9%	43,1%	10%	16,1%	13,8%	100%
3.	Linkungan yang tidak kondusif	31	71	11	15	2	130
		23,8%	54,6%	8,4%	11,5%	1,5%	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>181</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>30</b>	<b>390</b>
		<b>18,7%</b>	<b>46,4%</b>	<b>13,1%</b>	<b>14,1%</b>	<b>7,6%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.6 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor fisik individu dan lingkungan dengan sub indikator lingkungan yang kondusif berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah sebanyak 18,7% responden menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 46,4% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, sebanyak 13,1% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 14,1% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 7,6% responden menyatakan tidak setuju atau tidak

berpengaruh faktor fisik individu dan lingkungan dengan indikator lingkungan yang kondusif terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, maka faktor lingkungan yang kondusif dengan sub indikator lingkungan yang kondusif berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu dalam kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menjawab setuju atau berpengaruh sebanyak 46,4% responden.

Dengan demikian ketika kondisi lingkungan kondusif akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan sebaliknya yang terjadi kondisi tidak aman atau kondusif berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Ketika kondisi lingkungan tidak kondusif, nyaman dan keamanan tidak dirasakan oleh masyarakat dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan dan juga partisipasi masyarakat akan berkurang. Artinya pembangunan akan berjalan lambat dan partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat tidak akan maksimal.

#### **5.2.4 Faktor Nilai Dan Budaya**

##### **a. Pengetahuan dan Sikap**

Pengetahuan dan sikap seseorang tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan pembangunan itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Untuk mengetahui jawaban responden tentang pengetahuan pentingnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Nilai Dan Budaya Dengan Sub Indikator Pengetahuan Dan Sikap**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Pengetahuan tentang pentingnya partisipasi	31	63	10	9	17	130
		23,8%	48,4%	7,6%	6,9%	13,1%	100%
2.	Pemahaman tentang nilai-nilai pembangunan	24	56	13	16	21	130
		18,4%	43,1%	10%	12,3%	16,1%	100%
3.	Nilai budaya dan tradisi	38	81	7	0	4	130
		29,2%	62,3%	5,3%	0%	3,1%	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>390</b>
		<b>23,8%</b>	<b>51,2%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>10,7%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.7 diatas, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor nilai dan budaya dengan sub indikator pengetahuan dan sikap yaitu sebanyak 23,8% responden menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 51,2% responden menyatakan setuju atau berpengaruh. Sebanyak 7,6% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, kemudian 6,4% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan 10,7% responden menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh faktor nilai dan budaya dengan sub indikator pengetahuan dan sikap terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor nilai dan budaya dengan sub indikator pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Temblahan Hulu. Hal ini sesuai dengan persentase jawaban responden terbesar yaitu 51,2% menyatakan berpengaruh.

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas bahwasannya semakin tinggi pemahaman seseorang akan nilai-nilai dari sebuah pembangunan itu maka akan semakin bagus pula tingkat partisipasi yang diberikan, terlepas dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang tersebut. Nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat yang heterogen membuat pola pikir dari masing-masing kelompok masyarakat menjadi berbeda-beda. Dengan demikian ketika pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pembangunan itu bagus maka akan berdampak kepada tingkat partisipasi dan kontribusi yang mereka berikan.

#### **b. Kepercayaan Politik**

Persepsi masyarakat tentang politik itu hanya diperuntukkan kepada kalangan tertentu dan memiliki citra yang kurang baik menjadikan faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang. Pandangan Masyarakat tentang pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat menjadikan mereka enggan untuk ikut berpartisipasi. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah dengan sendirinya keinginan untuk turut andil bagian dalam kegiatan pembangunan itu muncul.



Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban responden tentang kepercayaan yang baik terhadap pemerintah dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan pembangunan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Faktor Nilai Dan Budaya Dengan Sub Indikator Kepercayaan Politik**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Kepercayaan yang baik terhadap pemerintah	27	46	12	11	34	130
		20,7%	35,3%	9,2%	8,4%	26,1%	100%
2.	Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah	37	82	5	5	1	130
		28,4%	63,1%	3,8%	3,8%	0,7%	100%
3.	Program pemerintah yang dibuat	21	77	13	9	10	130
		16,1%	59,2%	10%	6,9%	7,6%	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	<b>205</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>390</b>
		<b>21,7%</b>	<b>52,5%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>11,5%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Dari tabel V.8, distribusi jawaban responden tentang rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan faktor nilai dan budaya dengan sub indikator kepercayaan politik berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebanyak 21,7% responden menyatakan sangat setuju atau sangat berpengaruh, kemudian 52,5% responden menyatakan setuju atau berpengaruh, kemudian 7,6% responden menyatakan cukup setuju atau cukup berpengaruh, sebanyak 6,4% responden menyatakan kurang setuju atau kurang berpengaruh dan sebanyak 11,5% responden

menyatakan tidak setuju atau tidak berpengaruh faktor nilai dan budaya dengan sub indikator kepercayaan politik terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju atau berpengaruh mengenai faktor kepercayaan politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan jawaban responden dengan persentase terbesar yakni berada pada skala setuju atau berpengaruh sebanyak 52,5%. Dengan demikian ketika kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah baik maka secara tidak langsung akan berdampak kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Begitu juga sebaliknya ketika masyarakat tidak memiliki pandangan yang baik terhadap pemerintah akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikhawatirkan akan mengurangi perencanaan partisipatif dalam setiap pembangunan.

Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Rendahnya kepercayaan yang penulis maksudkan disini adalah tanggapan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Artinya masyarakat enggan berpartisipasi apabila pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Pulau Palas Bapak Kursani yang mengatakan bahwa :

“pemerintah desa berupaya terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka dari itu kita merencanakan program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, hal ini kita harapkan nantinya akan ada timbal balik dari masyarakat kepada pemerintah” (wawancara 17-05-2013).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan hal ini sejalan dengan jawaban responden tentang program yang dilakukan pemerintah akan berdampak kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

### **5.3 Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Sub indikator Penelitian**

Secara keseluruhan, rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing-masing indikator penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **5.3.1 Faktor Sosial Dan Ekonomi**

Berikut ini rekapitulasi dari sub indikator faktor sosial dan ekonomi, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Sosial Dan Ekonomi Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Tingkat pendidikan	72	99	127	69	23	390
		18,4%	25,3%	32,5%	17,6%	5,8%	100%
2.	Tingkat pendapatan	67	175	70	42	36	390
		17,1%	44,8%	17,9%	10,7%	9,23%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>139</b>	<b>274</b>	<b>197</b>	<b>111</b>	<b>59</b>	<b>780</b>
		<b>17,8%</b>	<b>35,1%</b>	<b>25,2%</b>	<b>14,2%</b>	<b>7,5%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan data tabel V.9, rekapitulasi jawaban responden tentang faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat diketahui bahwa total jawaban responden yang menyatakan sangat setuju adalah 139 jawaban responden atau 17,8%, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 274 jawaban responden atau 35,1%, sebanyak 197 jawaban responden atau 25,2% menyatakan cukup setuju. Dengan total jawaban responden 111 atau 14,2% menyatakan kurang setuju dan 59 jawaban responden atau 7,5% menyatakan tidak setuju.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pualu Palas. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 139 jawaban yang menjawab SS :  $139 \times 5 = 695$

Jumlah skor untuk 274 jawaban yang menjawab S :  $274 \times 4 = 1096$

Jumlah skor untuk 193 jawaban yang menjawab CS :  $197 \times 3 = 591$

Jumlah skor untuk 111 jawaban yang menjawab KS :  $111 \times 2 = 222$

Jumlah skor untuk 59 jawaban yang menjawab TS	:	$59 \times 1 = 59$	+
Jumlah total	:	$= 2663$	

$F = 2663$

$N = 780 \times 5 = 3900$

Maka  $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

$P = \frac{2663}{3900} \times 100\%$

$P = \frac{266300}{3900}$

$P = 68,2\%$

Jumlah skor ideal untuk seluruh item  $5 \times 780 = 3900$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari indikator ini adalah 2663. Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah 68,2%.

Jadi berdasarkan jawaban responden tentang faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebesar 68,2% dan dinyatakan **Cukup Berpengaruh**. Karena Sesuai dengan teknik pengukuran menurut **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh : 76-100 %

Cukup Setuju/cukup berpengaruh : 56-75 %

Tidak Setuju/tidak berpengaruh : 40-45 %

Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh: 0-39 %

Dari hasil data diatas bahwasannya faktor sosial dan ekonomi cukup berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di pulau palas bermata pencaharian petani. Mereka masih berpikir bagaimana caranya bekerja untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tingkat partisipasi berupa materi masih sangat kecil. Dengan masyarakat desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tradisional dan tingkat pendapatannya pun tergolong rendah maka akan berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa

Selanjutnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Palas yang dapat kita lihat pada tabel 4.6 menunjukkan bahwasannya hanya 1,29% masyarakat yang tidak mengenyam bangku sekolah. Dimana tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin masyarakat lebih aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

### **5.3.2 Faktor Politik**

Berikut ini rekapitulasi dari sub indikator faktor politik, yaitu komunikasi politik dan kesadaran politik. Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Politik Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Komunikasi Politik	235	79	45	14	17	390
		60,2%	20,%	11,5%	3,5%	4,3%	100%
2.	Kesadaran Politik	115	135	53	34	53	390
		29,4%	34,6%	13,5%	8,7%	13,5%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>350</b>	<b>214</b>	<b>98</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>780</b>
		<b>44,8%</b>	<b>27,4%</b>	<b>12,5%</b>	<b>6,1%</b>	<b>8,9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan data tabel V.10, rekapitulasi jawaban responden tentang faktor politik mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat diketahui bahwa total jawaban responden yang menyatakan sangat setuju adalah 350 jawaban responden atau 44,8%, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 214 jawaban responden atau 27,4%, sebanyak 98 jawaban responden atau 12,5% menyatakan cukup setuju. Dengan total jawaban responden 48 atau 6,1% menyatakan kurang setuju dan 70 jawaban responden atau 8,9% menyatakan tidak setuju.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor politik terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pualu Palas. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 350 jawaban yang menjawab SS :  $350 \times 5 = 1750$

Jumlah skor untuk 214 jawaban yang menjawab S :  $214 \times 4 = 856$

Jumlah skor untuk 98 jawaban yang menjawab CS :  $98 \times 3 = 294$

Jumlah skor untuk 48 jawaban yang menjawab KS :  $48 \times 2 = 96$

Jumlah skor untuk 70 jawaban yang menjawab TS :  $70 \times 1 = 70$  +  
 Jumlah Total :  $= 3066$

$F = 3066$

$N = 780 \times 5 = 3900$

Maka  $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

$P = \frac{3066}{3900} \times 100\%$

$P = \frac{306600}{3900}$

$P = 78,6\%$

Jumlah skor ideal untuk seluruh item  $5 \times 780 = 3900$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari indikator ini adalah 3066. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap faktor politik mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah 78,6%.

Jadi berdasarkan jawaban responden tentang faktor politik mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebesar 78,6% dan dinyatakan **Berpengaruh**. Karena Sesuai dengan teknik pengukuran menurut **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh : 76-100 %

Cukup Setuju/cukup berpengaruh : 56-75 %

Tidak Setuju/tidak berpengaruh : 40-45 %

Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh: 0-39 %

Ketika komunikasi politik yang dilakukan dari pemerintah itu bagus secara otomatis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan



meningkat. Begitu juga sebaliknya disaat pemerintah kurang mengadakan sosialisasi tentang perencanaan partisipatif dalam kegiatan pembangunan maka tingkat partisipasi masyarakat akan rendah. Dan juga dari masyarakat sendiri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas sendiri masih rendah karena tidak adanya dorongan keinginan yang kuat untuk ikut melakukan kegiatan berpartisipasi, disebabkan oleh faktor lingkungan dan pola pikir dari masyarakat itu sendiri.

### 5.3.3 Faktor Fisik Individu Dan Lingkungan

Berikut ini rekapitulasi dari sub indikator faktor fisik individu dan lingkungan, yaitu kondisi fisik, jenis kelamin dan lingkungan yang kondusif.

Untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Fisik Individu Dan lingkungan Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Kondisi fisik dan jenis kelamin	130	109	30	57	64	390
		33,3%	27,9%	7,6%	14,6%	16,4%	100%
2.	Lingkungan yang kondusif	73	181	51	55	30	390
		18,7%	46,4%	13,1%	14,1%	7,6%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>203</b>	<b>290</b>	<b>81</b>	<b>112</b>	<b>94</b>	<b>780</b>
		<b>26,1%</b>	<b>37,1%</b>	<b>10,3%</b>	<b>14,3%</b>	<b>12,1%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan data tabel V.11, rekapitulasi jawaban responden tentang faktor fisik individu dan lingkungan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat diketahui bahwa total jawaban

responden yang menyatakan sangat setuju adalah 203 jawaban responden atau 26,1%, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 290 jawaban responden atau 37,1%, sebanyak 81 jawaban responden atau 10,3% menyatakan cukup setuju. Dengan total jawaban responden 112 atau 14,3% menyatakan kurang setuju dan 94 jawaban responden atau 12,1% menyatakan tidak setuju.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor fisik individu dan lingkungan terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pualu Palas. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 203 jawaban yang menjawab SS :	203x5 = 1015
Jumlah skor untuk 290 jawaban yang menjawab S :	290x4 = 1160
Jumlah skor untuk 81 jawaban yang menjawab CS :	81x3 = 243
Jumlah skor untuk 112 jawaban yang menjawab KS :	112x2 = 224
Jumlah skor untuk 94 jawaban yang menjawab TS :	94x1 = 94
Jumlah Total :	<hr/> = 2736

$$F = 2736$$

$$N = 780 \times 5 = 3900$$

Dengan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

$$\text{Maka } P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{2736}{3900} \times 100\%$$

$$P = \frac{273600}{3900}$$

$$P = 70,1\%$$

Jumlah skor ideal untuk seluruh item  $5 \times 780 = 3900$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari indikator ini adalah 2736. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap faktor fisik individu dan lingkungan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah 70,1%

Jadi berdasarkan jawaban responden tentang faktor fisik individu dan lingkungan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebesar 70,1% dan dinyatakan **Cukup Berpengaruh**. Karena Sesuai dengan teknik pengukuran menurut **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh : 76-100 %

Cukup Setuju/cukup berpengaruh : 56-75 %

Tidak Setuju/tidak berpengaruh : 40-45 %

Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh: 0-39 %

Disaat seseorang dalam keadaan fisik yang prima maka dia akan bisa melakukan apapun termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Karena disaat seseorang dalam kondisi fisik yang tidak prima maka kecendrungan untuk melakukan sesuatu itu sangat kecil dan bahkan tidak bisa. Dan jenis kelamin masih menjadi faktor dominan kegiatan partisipasi. Laki-laki dituntut untuk lebih andil bagian dalam kegiatan pembangunan.

### 5.3.4 Faktor Nilai Dan Budaya

Berikut ini rekapitulasi jawaban responden dari sub indikator faktor nilai dan budaya, yaitu pengetahuan dan sikap, dan kepercayaan politik. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor Nilai Dan Budaya Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Pengetahuan dan sikap	93	200	30	25	42	390
		23,8%	51,2%	7,6%	6,4%	10,7%	100%
2.	Kepercayaan politik	85	205	30	25	45	390
		21,7%	52,5%	7,6%	6,4%	11,5%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>178</b>	<b>405</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>780</b>
		<b>22,8%</b>	<b>51,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,4%</b>	<b>11,1%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan data tabel V.12, rekapitulasi jawaban responden tentang faktor nilai dan budaya mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat diketahui bahwa total jawaban responden yang menyatakan sangat setuju adalah 178 jawaban responden atau 22,8%, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 405 jawaban responden atau 51,9%, sebanyak 60 jawaban responden atau 7,6% menyatakan cukup setuju. Dengan total jawaban responden 50 atau 6,4% menyatakan kurang setuju dan 87 jawaban responden atau 11,1% menyatakan tidak setuju.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor nilai dan budaya terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan di Desa Pualu Palas. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 178 jawaban yang menjawab SS	:	178x5 = 890
Jumlah skor untuk 405 jawaban yang menjawab S	:	405x4 = 1620
Jumlah skor untuk 60 jawaban yang menjawab CS	:	60x3 = 180
Jumlah skor untuk 50 jawaban yang menjawab KS	:	50x2 = 100
Jumlah skor untuk 87 jawaban yang menjawab TS	:	87x1 = 87 +
Jumlah Total	:	= 2877

$$F = 2877$$

$$N = 780 \times 5 = 3900$$

Dengan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

$$\text{Maka } P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{2877}{3900} \times 100\%$$

$$P = \frac{287700}{3900}$$

$$P = 73,7\%$$

Jumlah skor ideal untuk seluruh item  $5 \times 780 = 3900$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari indikator ini adalah 2877. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap faktor nilai dan budaya

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah 73,7%

Jadi berdasarkan jawaban responden tentang faktor nilai dan budaya mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebesar 73,7% dan dinyatakan **Cukup Berpengaruh**. Karena Sesuai dengan teknik pengukuran menurut **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh	: 76-100 %
Cukup Setuju/cukup berpengaruh	: 56-75 %
Tidak Setuju/tidak berpengaruh	: 40-45 %
Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh:	0-39 %

Masyarakat beranggapan bahwasanya urusan negara dan pemerintah itu urusan pegawai negeri atau aparatur pemerintah saja, sehingga masyarakat enggan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Selanjutnya Rendahnya kepercayaan yang dimaksudkan adalah tanggapan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Munculnya isu-isu atau berita nasioanal tentang permasalahan yang terjadi dinegeri ini yang mana pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### **5.4 Rekapitulasi Seluruh Indikator**

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini :

**Tabel V.13 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		SS	S	CS	KS	TS	
1.	Faktor sosial dan ekonomi	139	274	197	111	59	780
		17,8%	35,1%	25,2%	14,2%	7,5%	100%
2.	Faktor politik	350	214	98	48	70	780
		44,8%	27,4%	12,5%	6,1%	8,9%	100%
3.	faktor fisik individu dan lingkungan	203	290	81	112	94	780
		26,1%	37,1%	20,3%	14,3%	12,1%	100%
4.	Faktor nilai dan budaya	178	405	60	50	87	780
		22,8%	51,9%	7,6%	6,4%	11,1%	100%
<b>Jumlah</b>		<b>870</b>	<b>1183</b>	<b>436</b>	<b>321</b>	<b>310</b>	<b>3120</b>
		<b>27,8%</b>	<b>37,9%</b>	<b>13,9%</b>	<b>10,2%</b>	<b>9,9%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan data tabel V.13, rekapitulasi jawaban responden tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui bahwa total jawaban responden yang menyatakan sangat setuju adalah 870 jawaban responden atau 27,8%, kemudian yang menjawab setuju sebanyak 1183 jawaban responden atau 37,9%, sebanyak 436 jawaban responden atau 13,9% menyatakan cukup setuju. Dengan total jawaban responden 321 atau 10,2% menyatakan kurang setuju dan 310 jawaban responden atau 9,9% menyatakan tidak setuju.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 870 jawaban yang menjawab SS :	$870 \times 5 = 4350$
Jumlah skor untuk 1183 jawaban yang menjawab S :	$1183 \times 4 = 4732$
Jumlah skor untuk 436 jawaban yang menjawab CS :	$436 \times 3 = 1308$
Jumlah skor untuk 321 jawaban yang menjawab KS :	$321 \times 2 = 642$
Jumlah skor untuk 310 jawaban yang menjawab TS :	$310 \times 1 = 310 +$
Jumlah Total :	$= 11342$

$$F = 11342$$

$$N = 3120 \times 5 = 15600$$

Dengan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

$$\text{Maka } P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{11342}{15600} \times 100\%$$

$$P = \frac{1134200}{15600}$$

$$P = 72,7\%$$



Jumlah skor ideal untuk seluruh item  $5 \times 3120 = 15600$  (seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh indikator ini adalah 11342. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir adalah 72,7%.

Jadi berdasarkan jawaban responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebesar 72,7% dan dinyatakan **Cukup Berpengaruh**. Karena Sesuai dengan teknik pengukuran menurut **Suhairimi Ari Kunto (2003:171)**, sebagai berikut:

Setuju/berpengaruh : 76-100 %

Cukup Setuju/cukup berpengaruh : 56-75 %

Tidak Setuju/tidak berpengaruh : 40-45 %

Sangat tidak setuju/sangat tidak berpengaruh: 0-39 %.

Kemudian yang menjadi faktor dominan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dari keempat indikator diatas dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.14 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi**

No	Indikator	Responden (N)	Frekuensi (F)
1	Faktor sosial dan ekonomi	2633	68,2%
2	Faktor politik	3066	78,6%
3	Faktor fisik individu dan lingkungan	2736	70,1%
4	Faktor nilai dan budaya	2877	73,7%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013*

Berdasarkan tabel V.14 tentang rekapitulasi jawaban responden mengenai faktor-faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir adalah faktor sosial dan ekonomi dengan total skor jawaban responden 2633 atau 68,2%, kemudian faktor politik total skor jawaban responden 3066 atau 78,6%, selanjutnya faktor fisik individu dan lingkungan dengan total skor jawaban responden yaitu 2736 atau 70,1% dan faktor nilai dan budaya dengan total skor jawaban responden 2877 atau 73,7%.

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah faktor politik yaitu sebesar 78,6%.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dalam hal ini, tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan menempatkan rencana partisipatif dalam setiap kegiatan pembangunan. Ketika komunikasi politik yang baik dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, diharapkan akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Namun pada kenyataannya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa Pulau Palas disebabkan oleh faktor ini. Mereka kebanyakan tidak dilibatkan secara aktif terhadap setiap pembangunan yang akan

dilaksanakan dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah desa tentang kebutuhan yang mereka inginkan. Sehingga masyarakat sendiri acuh tak acuh terhadap kegiatan pembangunan dan secara otomatis kesadaran masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi menjadi rendah.

### **5.5 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan**

Setelah penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka selanjutnya penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan pemerintah desa melalui penerapan demokrasi di Desa pulau palas kecamatan Tembilahan hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penerapan demokrasi ini yaitu mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam mengambil keputusan, artinya keputusan yang diambil pemerintah desa berasal dari aspirasi masyarakat dan masukan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Kursani dalam wawancaranya yang mengatakan :

“setiap kebijakan atau program yang dilakukan oleh Desa selalu kami upaya kan untuk dibicarakan terlebih dahulu. Biasanya ketika rapat membahas tentang rencana pembangunan desa kita menampung apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat, tetapi masih lemahnya kesadaran dan masih kurang optimalnya peran aparat pemerintah sendiri membuat

kegiatan partisipasi itu tidak maksimal dan pemerintah desa sendiri sekarang ini harus kerja lebih ekstra untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat”.(wawancara 17-05-2013).

2. Melakukan upaya pemanfaatan organisasi yang sudah ada.

Maksudnya disini organisasi-organisasi yang ada di Desa Pulau Palas baik itu organisasi formal ataupun nonformal lebih dimanfaatkan dan dimaksimalkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Seperti organisasi kepemudaan, karang taruna, ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, kelompok tani dan lain sebagainya. Kita upaya untuk melibatkan kelompok-kelompok seperti ini sehingga lebih mudah mengarahkan massa yang lebih banyak yang nantinya akan meningkatkan partisipasi itu sendiri.

3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga diantaranya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara setiap kegiatan pembangunan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, pemerintah desa berupaya agar para masyarakat bisa melibatkan diri yang nantinya akan menambah pendapatan masyarakat. Seperti apabila ada proyek-proyek yang dilakukan di lingkungan Desa maka kita harapkan banyak menyerap tenaga kerja lokal.
4. Adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga akan terjadi hubungan keterikatan yang nantinya terjadi sinkronisasi pandangan demi terwujudnya suatu pembangunan yang partisipatif.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan sub variabel penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial dan ekonomi dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata. Hal ini disebabkan karena sarana pendidikan yang masih kurang yang ada di desa pulau palas, seperti kurangnya lembaga pendidikan yang ada dan masih jauhnya akses pendidikan yang masyarakat tempuh mengakibatkan kurangnya semangat belajar. Dari tingkat pendapatan dimana mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani tradisional yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Faktor politik berdasarkan sub indikator komunikasi politik dan kesadaran politik yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi adalah masyarakat beranggapan masalah negara atau pemerintah itu hanya PNS atau elite tertentu saja yang harus berpartisipasi. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya turut serta dalam urusan pemerintah atau birokrasi itu tidak maksimal

3. Faktor fisik individu dan lingkungan berdasarkan sub indikator kondisi fisik dan jenis kelamin dan kondisi lingkungan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi adalah mereka yang dalam kondisi tertentu atau kondisi kesehatan yang tidak prima akan kurang ikut serta dalam kegiatan partisipasi. Dan juga jenis kelamin menjadi faktor dominan seseorang ikut berpartisipasi, masyarakat Desa Pulau Palas beranggapan perempuan itu dirumah saja untuk mengurus rumah tangga.
4. Faktor nilai dan budaya berdasarkan sub indikator pemahaman nilai dan sikap dan kepercayaan politik yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang belakangan ini dianggap tidak memihak kepada rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan sebagian golongan saja, sehingga masyarakat beranggapan apa yang diberikan atau disumbangkan masyarakat nantinya tidak ada timbal balik yang positif atau yang sifatnya menguntungkan masyarakat itu sendiri.

Adapun faktor dominan yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator diatas dengan total skor tertinggi yaitu **Faktor Politik**.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah desa demi tercapainya tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

pembangunan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus lebih optimal dan ekstra keras untuk merangkul semua kalangan masyarakat secara merata dan tidak membedakan golongan tertentu untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan.
2. Pemerintah desa hendaknya lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dengan tepat sasarannya program pembangunan yang dilaksanakan kesadaran masyarakat untuk turut serta berpartisipasi semakin meningkat.
3. Sosialisasi tentang pentingnya perencanaan partisipatif dalam kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
4. Adanya hubungan yang baik dari pemerintah desa terhadap masyarakat sehingga lebih padu didalam setiap program kegiatan yang akan dilakukan.
5. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta didalam kegiatan pembangunan bilamana hal itu dibutuhkan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan yang masih minim.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara program-program yang dilakukan lebih terfokus kepada perbaikan perekonomian rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmita. Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2003, *Prosedur Penelitian*. Jakarta , Rineka Cipta
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi birokrasi demokratisasi kebijakan*, Malang : Avveroes Press
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Hamin, Sufian. 2003. *Sistem Perencanaan Stratetegis dalam pembangunan*. Pekanbaru: UIR PRESS
- Haris, Syamsuddin. 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2007. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI PRESS.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia*, LP3S, Jakarta
- Mikelsen, Britha. 1999, *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Moloeng, Lexy. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Ndraha, T. 2008. *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nimmo, Dan. 2000, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Rosda Karya, Bandung.



Ruslan, Rasady. 2003. *Metode Penelitian public relations dan komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Singaribuan, Masri. 1987, *Metode Penelitian Survai*, LP3S, Jakarta.

Soekidjo, Notoatmodjo. 2007. *Ilmu Prilaku*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono.2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan perumahan secara kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.

Syaprizal, Skripsi, *Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan APBD Kota Medan*, Tahun 2007

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negri No.5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.

Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 16 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa*.

Perdes No.03 Tahun 2012 tentang *Rencana Kegiatan Pembangunan*

### **Media Internet**

Arsito, D.A. 2004, Rejuvinasi Peran Perencanaan Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “ Sebuah Tahapan Awal Dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan dalam : Seminar Taunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universits Brawijaya, Malang. Teknik Planologi ITB. <http://www.mirror.depsos.go.id/>., diakses 1 February 2013.